



BKAD

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA



**PON XXI
SUMUT
SUKSES**

**MENUJU
WTP KE-11
ANTARA OPTIMISME,
TANTANGAN
DAN KOMITMEN**

Selamat & Sukses

Atas Pelantikan
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

*Bapak Prabowo Subianto dan
Bapak Gibran Rakabuming Raka*

20 Oktober 2024 - 2029

Terima Kasih

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

*Bapak Ir. H. Joko Widodo dan
Bapak K. H. Ma'ruf Amin*

20 Oktober 2019 - 2024

Selamat atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Selamat memulai babak baru pembangunan bangsa. Menuju Indonesia Maju. Indonesia Emas di masa akan datang.

Terima kasih, kepada Bapak Bangsa, Bapak Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin. Terima kasih telah membangun sejarah baru Indonesia. Menjadi bangsa yang mampu melakukan lompatan-lompatan besar. Menjadi salah satu negara yang sejajar dengan negara-negara maju di dunia.



Mari Bergerak
Bersama Sukseskan
**PEKAN OLAHRAGA
NASIONAL XXI**
Aceh - Sumut 2024

8 - 20 SEPTEMBER 2024



Dr. Drs. A. Firdoni, M. Ed.
Ketua Panitia Sumut



**BERSATU
KITA!
JUARA!**



Assalamualaikum Wr.Wb

Salam Sumut Mantap dan Harmoni.

Sebagai Kepala BKAD Provsu tentu saya mengapresiasi dan menyambut baik lahirnya Buletin Kinerja BKAD 2024. Ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provsu berjalan baik.

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan, setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan Informasi Publik kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu dengan cara sederhana, menjadi bagian yang tak kalah penting untuk dijalankan.

Buletin Kinerja BKAD 2024 ini diharapkan mampu menjadi jawaban kebutuhan informasi dan bahan dokumentasi dan pelayanan informasi publik yang dikelola PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) BKAD Provsu yang sudah ditunjuk.

Saya berharap Buletin Kinerja BKAD Provsu 2024 ini bisa hadir dan menyapa pembacanya secara berkelanjutan sebagai salah satu media bahan bacaan internal dan mitra BKAD Provsu sesuai prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi informasi.

Sekali lagi, Selamat atas penerbitan edisi perdana Buletin Kinerja BKAD 2024.

Wassalam...!!

Muhammad Rahmadani Lubis, SE, M.M
Kepala BKAD Sumut

06
Menuju
WTP ke-11
Antara Optimisme,
Tantangan dan
Komitmen

32
Konsistensi
Akuntabilitas
Laporan
Keuangan,
Kunci Menuju
WTP Ke-11

48
“Kemauan dan
Komitmen jadi
Kunci WTP,
Kabupaten/Kota
Didorong Agar Naik
Kelas”

Daftar Isi

26
Dukungan Sekretariat
Strategis dalam
Mengkoordinasikan
Kinerja BKAD Sumut

38
Pengelolaan Aset Daerah,
Fokus pada Penguatan
Tertib Administrasi
Hingga Aspek Histori

52
“Perencanaan dan
Kebutuhan Anggaran
Harus Selaras dengan
Target Pembangunan”

Salam Redaksi

Di tengah gempuran dunia digital dan informasi berbasis web, satu langkah berani diambil Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara melahirkan kembali bahan bacaan cetak Buletin Kinerja BKAD Tahun 2024.

Bukan satu hal mudah menyusun ragam informasi Buletin Kinerja BKAD Provsu 2024 ini. Tim redaksi yang dibentuk berusaha meramu berbagai informasi laporan keuangan bidang dalam lingkup kinerja keuangan daerah, proses penganggaran dan realisasi belanja hingga posisi aset dan pengelolaan barang milik daerah sebagai lumbung informasi yang bisa diukur, baik sebagai capaian kinerja, progres kegiatan tahunan maupun parameter keterbukaan informasi publik.

Semua informasi yang tersaji dalam Buletin Kinerja BKAD 2024 ini selain dicetak dalam bentuk cetakan Buletin juga disebarluaskan melalui PDF WA Blasting Broadcaster ke sejumlah pengguna seluler semua operator di Sumatera Utara sebagai bentuk penyebarluasan informasi .

Selain mengulik tentang persiapan dan langkah jitu dalam menjaga budaya kinerja keuangan Pemprovsu agar tetap berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya di tahun 2025 mendatang , Redaksi juga menyajikan informasi seputar dukungan BKAD Provsu atas penyelenggaraan event Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang digelar pada September 2024 dimana Sumatera Utara menjadi salah satu tuan rumah bersama Aceh. Dukungan penyiapan anggaran ini sebagai bentuk kerja cepat BKAD dalam memberikan dukungan full terhadap penyelenggaraan PON 2024.

Kami ucapkan terimakasih kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara, Bapak H . Rahmadani Lubis , SE, MM dan Sekretaris Drs. Hendra Yudi, M.Kes yang telah mendukung penuh terbitnya Buletin Kinerja BKAD 2024 ini.

Tak lupa salam hormat kepada narasumber dan tim pendukung yang ‘membedani lahirnya’ Buletin Kinerja BKAD 2024 ini , wa bil khusus Abangda Ono, Yafizham, Izad , Adinda Nanda dan seluruh tim yang mendukung terbitnya Buletin Kinerja BKAD 2024. Wassalam...!!

#Salam Sumut Mantap

Tim Produksi Buletin BKAD Provinsi Sumut

Pengarah : Kepala Badan Keuangan dan Aset Provsu, H.Rahmadani Lubis, SE, MM

Penanggungjawab : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Provsu, Hendra Yudi, M.Kes.

Dewan Redaksi : Suwito, Hj.Halimatussa'adiyah, Ratna Sari Pinem, Diah Ananda, Ahmad Syafei.

Supporting Data : Yafizham Parinduri,Suaidi Harahap,Taufik Azhar, Syahrizad, M.Fahmi, Triono Harto, Novanti, Madaniah, Aditya Irsandi.

Managing Editor /Pelaksana Redaksi : A. Popay

Penulis : David Susanto, Zulfikar Tanjung, Iqbal Harahap, Anggie.

Desain Layout : Deny Prihadi

Fotografer & Video : Rizky Firman, Mizi, Nanda.

Alamat Redaksi : Jl. Imam Bonjol No.61, Suka Damai, Kec.Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20157

Website : www.bkad.sumutprov.go.id

(isi di luar tanggungjawab percetakan)



Menuju WTP ke-11 Antara Optimisme, Tantangan dan Komitmen

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PemprovSU) terus memperkuat strategi pengelolaan laporan keuangan daerah tahun 2024 dengan lebih komprehensif dan akurat guna memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas. Upaya ini dilakukan guna meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kalinya secara beruntun.



“Tingkat kesulitan akan terus meningkat, tetapi kita harus tetap optimis.”

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara, H. Muhammad Rahmadani Lubis, SE,MM, mengakui bahwa mempertahankan prestasi jauh lebih sulit dibandingkan saat pertama kali meraihnya.

Predikat WTP yang kembali diperjuangkan Pemprovsum untuk ke-11 kalinya menjadi sebuah capaian strategis yang menjadi tonggak penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel dan transparan.

“Semakin seringnya WTP diraih oleh provinsi atau kabupaten/kota, tingkat kesulitannya akan semakin tinggi. Pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) nantinya juga semakin detail,” ungkap H. Dani, sapaan akrab H. Rahmadani Lubis.

Ia mencontohkan bahwa pada WTP pertama, pemeriksaan belum terlalu rinci dan luas. Namun, setelah berulang kali meraihnya, pemeriksaan laporan keuangan daerah akan semakin rinci dan menyeluruh.

Setiap catatan yang diberikan BPK di tahun sebelumnya akan kembali diperiksa lebih dalam, khusus dan terperinci, termasuk langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan Pemprovsum. Semakin seringnya predikat WTP diraih, laporan keuangan pun dituntut untuk semakin sempurna.

H. Dani mengaku pada pencapaian WTP ke-10 lalu, Pemprovsum masih menerima beberapa catatan BPK. Karenanya, semua catatan tersebut harus ditindaklanjuti dengan solusi yang konkrit.

Ia menyadari bahwa pencapaian WTP ke-11 yang semakin sulit harus tetap dibarengi sikap optimis, kerja keras, kemauan serta komitmen bersama sehingga target capaian WTP bisa diraih. “Tingkat kesulitan akan terus meningkat, tetapi kita harus tetap optimis, WTP bisa kita raih kembali untuk ke-11 kalinya,” ucapnya.

Tantangan besar ini, kata H. Dani harus dihadapi dengan kesungguhan serta strategi yang matang. Pemprovsum perlu menindaklanjuti berbagai kekurangan yang ada berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya.

Hal ini meliputi penganggaran, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pengelolaan barang milik daerah yang dikoordinasikan oleh BKAD Provsum.

Menurutnya, masalah pengelolaan barang milik daerah memerlukan perhatian khusus. Pemprovsum terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan setiap catatan BPK ditindaklanjuti dengan baik.



Tantangan Internal dan Eksternal

H. Dhani menguraikan bahwa dalam upaya meraih WTP ke-11, PemprovSU menghadapi berbagai tantangan berbeda, baik yang datang dari internal maupun eksternal institusi.

Dari sisi internal, seluruh lini pemerintahan dihadapkan pada tantangan untuk tetap menjalankan pengelolaan keuangan daerah sesuai prinsip-prinsip dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, semua harus terlaksana dan terealisasi dengan jelas dan terukur. Pengelolaan keuangan daerah yang menjadi fokus pemeriksaan BPK juga termasuk dalam pengawasan dan pembinaan.

Selain itu H.Dani menyebut aspek pengelolaan aset daerah menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, PemprovSU mendapat supervisi langsung dari lembaga rasuah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah lebih transparan.



“Seiring dengan semakin seringnya WTP diraih oleh provinsi atau kabupaten/kota, tingkat kesulitannya semakin tinggi. Pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga semakin detail.”



Dari sisi eksternal, tantangan yang dimaksud datang dari keselarasan dan terkaitan antara pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, kebutuhan belanja pembangunan yang tinggi di Sumut juga menjadi kendala.

Dengan luas wilayah Sumatera Utara yang terdiri dari 33 kabupaten/kota dan panjang jalan mencapai lebih dari 3.000 kilometer, H.Dani menyebut Sumut

membutuhkan dana besar. Sementara alokasi kucuran dana pemerintah pusat melalui dana bagi hasil harus diakui belum memadai.

“Dalam peraturan perundang-undangan, dana bagi hasil yang kita terima sudah sesuai. Namun, luasnya wilayah dan besarnya kebutuhan pembangunan di Sumut membuat transfer dana pusat ke daerah baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus

(DAK) belum mencukupi,” jelasnya.

Tantangan berat yang dihadapi PemprovSU dalam meraih WTP ke-11 baik dari sisi internal maupun eksternal menjadikan sikap optimisme sebagai prinsip yang harus dipegang. Dengan komitmen kuat serta koordinasi baik antar semua pihak, PemprovSU diharapkan mampu kembali meraih predikat WTP dengan terus mendorong tata kelola keuangan yang kian membaik.



Tata Kelola BUMD dan Kontribusi Terhadap WTP

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga turut mempengaruhi faktor eksternal pencapaian WTP. Menurut H. Dani, pengelolaan BUMD yang baik akan memberikan dampak positif terhadap keuangan daerah. Sebaliknya, jika BUMD merugi, hal ini dapat mengurangi kepercayaan BPK terhadap kinerja keuangan daerah.

“Pemprov Sumut sebagai pemilik BUMD harus terus memperkuat tata kelola perusahaan-perusahaan ini agar tidak membebani keuangan daerah. Manajemen BUMD yang baik tidak hanya akan mempengaruhi performa bisnis, tetapi juga memperkuat good governance di lingkungan Pemprov Sumut secara keseluruhan,” jelasnya.



Pengelolaan Dana BOS

Hal yang sama juga terjadi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjadi sorotan penting dalam penilaian BPK. Meskipun dana ini disalurkan langsung dari pemerintah pusat ke rekening sekolah tanpa melalui kas daerah, pertanggungjawaban penggunaannya tetap harus dikoordinasikan oleh BKAD.

“Dana BOS masuk dalam sumber pendapatan APBD, namun penyalurannya tidak melalui kas daerah. Hal ini sering menimbulkan masalah dalam pengawasan dan akuntabilitasnya,” ungkap H.Dani.

Untuk memastikan kelancaran pengelolaan dana ini, BKAD tetap berperan dalam memberikan arahan dan membina pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah, meskipun aliran dana ini tidak melalui BKAD Provsu.

Komitmen Semua Pihak

Dalam upayanya meraih predikat WTP untuk kali ke-11 secara beruntun, Pemprov Sumut melalui BKAD bersama seluruh stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya selaku ujung tombak pengelolaan keuangan daerah punya komitmen kuat dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan yang kian kompleks.

H. Dani menjelaskan peran OPD dalam tata kelola aset turut mempengaruhi pencapaian WTP tersebut. Sebagai koordinator laporan keuangan daerah, BKAD tak bisa bekerja sendiri. Pencapaian WTP yang diraih secara berturut-turut selama satu dekade sangat bergantung pada kinerja OPD mitra lainnya.

OPD yang menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), seperti Bappelitbang (Perencanaan Anggaran) dan Bapenda (Pendapatan Daerah), memiliki pengaruh besar dalam menentukan hasil penilaian.

“Kinerja OPD mitra yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan sangat mempengaruhi hasil audit BPK. Setiap temuan atau kekurangan harus diselesaikan. Jika tidak, dapat menjadi catatan yang mengurangi nilai WTP,” jelasnya.

Mantan Kepala Biro Kesra Setdaprov Sumut ini mencontohkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang merupakan salah satu OPD dengan serapan anggaran terbesar acap kali menjadi fokus utama dalam pemeriksaan BPK-RI.



Kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan, penggunaan anggaran, atau kelalaian lainnya sering kali memicu temuan. H. Dani menegaskan pentingnya setiap OPD melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan teliti untuk meminimalkan risiko temuan.

Untuk masalah pengelolaan aset juga menjadi tantangan lainnya yang dihadapi BKAD. Salah satu isu yang sering kali mencuat adalah sengketa tanah dan aset yang belum memiliki sertifikat. Ia mencontohkan persoalan Taman Makam Pahlawan yang berlokasi di

Jl. Sisingamangaraja, Medan. Meskipun pengelolaannya oleh Pemprov Sumut namun sertifikat areal ini masih atas nama Kementerian Pertahanan.

“Hal-hal seperti ini perlu segera diselesaikan agar administrasi aset lebih baik dan tidak memicu masalah di belakang hari,” ucapnya.

Sertifikasi aset daerah sangat penting untuk menjaga keabsahan kepemilikan dan mencegah sengketa yang bisa mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Selain tanah, kendaraan dinas juga menjadi fokus perhatian BKAD.

H. Dani menjelaskan bahwa apel kendaraan dinas yang rutin dilakukan untuk memastikan penggunaan aset bergerak sesuai aturan. “Terkadang ada pejabat yang menggunakan lebih dari satu kendaraan dinas, atau kendaraan dinas yang seharusnya sudah dikembalikan namun masih dipakai seorang mantan pejabat. Tugas BKAD lah menertibkan penggunaan aset ini dan memastikan peruntukannya sesuai,” sebutnya.

Meningkatkan Akuntabilitas

Meskipun pencapaian WTP 11 kali beruntun bukan hal mudah, namun H Rahmadani Lubis menyebut upaya yang dilakukan justru lebih menantang. “Semakin sering kita meraih WTP, pemeriksaan BPK akan semakin ketat dan teliti. Setiap OPD harus bekerja lebih keras untuk mengeliminir catatan atau temuan dari tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Pemprovsum dibawah arahan Pj Gubernur Sumut, Agus Fatoni kini terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap OPD didorong untuk memperkecil temuan dan menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK.

“Kita harus menanamkan pemahaman bahwa yang kita kelola ini adalah uang rakyat dan aset negara. Oleh karena itu, setiap pengelolaan keuangan dan aset harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab,” tegasnya.

Salah satu kunci dalam mempertahankan WTP adalah konsistensi dalam menindaklanjuti temuan BPK. H.Dani mencontohkan, adanya persoalan proyek multiyears contract (MYC) waktu lalu yang menyita perhatian publik.

BPK dan BKAD serta OPD terkait membuka ruang diskusi untuk menghitung ulang temuan mereka. Setelah dilakukan perhitungan bersama, hasil temuan ternyata lebih kecil dari perkiraan awal yang kemudian ditindaklanjuti Pemprovsum hingga tuntas.

Dalam hal pengembalian temuan, BKAD juga mendorong agar setiap temuan segera diselesaikan dalam batas waktu yang ditetapkan. “Jika temuan tidak segera dikembalikan, bisa menjadi catatan negatif yang nantinya mempengaruhi penilaian WTP. Karena itu, setiap OPD harus proaktif menindaklanjuti setiap catatan dari BPK,” katanya.



H. Dhani mengingatkan bahwa proses meraih WTP ke-11 tidak menjadi lebih mudah. Pemeriksaan BPK akan semakin teliti, dan setiap temuan kecil di masa lalu akan diperiksa lebih ketat.

Dengan tantangan eksternal yang semakin kompleks, mulai dari pengelolaan aset, BUMD, hingga dana BOS, Pemprov Sumut harus bekerja keras untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Semua pihak, mulai dari BKAD hingga OPD lainnya, harus menjaga harmoni dan fokus pada tugas masing-masing agar target WTP ke-11 dapat tercapai.

“Ini bukan tugas mudah, tetapi dengan kerjasama yang baik, komitmen yang kuat, stantangan dan kesulitan akan menjadi optimisme kita semua agar dapat mencapai target WTP ke-11 kalinya,” tutup H.Dani. (*)

Untuk memfasilitasi pemerintah kabupaten dan kota yang belum meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau masih memiliki predikat 'Wajar Dengan Pengecualian' atau WDP, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara H.Rahmadani Lubis, SE,MM menyebut BKAD Provsu telah melakukan berbagai upaya dan terobosan serta dukungan kepada kabupaten/kota.

Salah satunya adalah dengan meningkatkan komitmen seluruh kepala daerah dan jajarannya untuk memacu laporan keuangannya benar-benar komprehensif dan akurat dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.

Dukungan Untuk Kabupaten/Kota Peraih WDP

“Dengan komunikasi dan kolaborasi ini kami akan mengidentifikasi dan menindaklanjuti temuan-temuan sebelumnya sehingga tidak terulang di masa mendatang. Kami juga akan memetakan semua permasalahan yang ada sehingga kabupaten dan kota yang menjadi sasaran dan berpredikat WDP nantinya bisa naik kelas meraih WTP,” ujarnya.

Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi antara Pemprovsum dengan kabupaten/ kota, H.Dani menyebut, capaian Sumut untuk meraih WTP ke-11 kali secara beruntun menjadi sebuah stimulan dan energi positif bagi kabupaten/ kota.

Langkah ini menjadi momentum bahwa semua laporan keuangan pemerintahan di Sumut

termasuk kabupaten/kota mencerminkan budaya laporan yang bersih, akuntabel dan transparan di semua lini.

“Membangun kebiasaan 'good and clean' harus diperjuangkan sejak awal sehingga optimisme meraih WTP ke-11 kalinya menjadikan posisi Sumut kian mantap dan harmoni ke depannya,” ucap H.Dani .

Keuntungan lain meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP adalah membangkitkan semangat semua pihak serta membangun trust dan kepercayaan publik.

“Kita bahkan mendapatkan dana insentif daerah sebagai reward dan penghargaan yang diberikan pemerintah pusat sehingga prestasi ini menambah bonus keuangan dari pemerintah pusat ke daerah,” ucapnya

Disinggung soal peran Sekretariat dan bidang-bidang dalam mewujudkan capaian WTP, H.Dani menyebut salah satu fokus laporan keuangan Pemprovsum adalah bidang akuntansi dan pelaporan yang selalu berkoordinasi dengan sekretariat dalam setiap kegiatannya.

Menurutnya, peran semua sekretariat di lingkungan OPD termasuk Sekretaris BKAD Provinsi Sumatera Utara cukup strategis dalam upaya mengkoordinasikan laporan keuangan di masing-masing OPD untuk taat azas dan patuh pada aturan. (*)

Koordinasi OPD Lewat Sekretariat





Ir. Arief S. Trinugroho, MT
Sekretaris Daerah Provinsi
Sumatera Utara

“WTP jadi Budaya Laporan Keuangan Pemprowsu”

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut yang diraih Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprowsu) di tahun 2024 selain membanggakan Sumatera Utara juga dianggap istimewa. Label WTP ke-11 yang diharapkan kembali diraih tahun 2025 akan menjadi satu budaya wajib yang disematkan atas kinerja laporan keuangan daerah berpenduduk lebih 15 juta jiwa ini.



Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara, Arief Sudarto Trinugroho kepada Buletin BKAD memaparkan, sesuai arahan Pj.Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni yang juga Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI untuk memperkuat strategi laporan keuangan Pemprowsu di tahun mendatang.

“Semua langkah dan tahapan serta strategi dalam menyusun laporan keuangan harus sesuai dengan pedoman dan aturan sehingga untuk meraih predikat opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ bukan sebuah keniscayaan namun menjadi satu budaya yang wajib diraih Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” kata Arief yang ditemui di ruang kerjanya, akhir September 2024 lalu.

Untuk dapat menuju WTP 11 kali secara beruntun, Arief memaparkan strategi utama yang harus diperkokoh dengan tetap menjaga komitmen bersama di semua level kepentingan dengan membangun integritas, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan keuangan yang berlaku dalam rangka pengelolaan anggaran di daerah.



“Kita selaku objek yang diperiksa harus mampu memberikan penjelasan-penjelasan secara rinci dan logis sesuai dengan apa yang dimintakan oleh tim pemeriksa”

Dimana seluruh transaksi-transaksi keuangan dapat dengan mudah diakses khususnya oleh para pemeriksa. Langkah ini diperlukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan akuntansi keuangan daerah sudah on the track,” ucapnya.

Arief menekankan poin penting lainnya mewujudkan WTP ke-11 adalah membangun transparansi dan komunikasi penjelasan antara tim pemeriksa dengan seluruh OPD yang menjadi objek pemeriksaan termasuk BKAD sendiri.

“Kita selaku objek yang diperiksa harus mampu memberikan penjelasan-penjelasan secara rinci dan logis sesuai dengan apa yang dimintakan tim pemeriksa,” sebutnya.

“Tak kalah pentingnya adalah kepatuhan terhadap hukum dan seluruh peraturan pelaksanaan mulai dari perencanaan maupun penganggaran hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan,” sambung Arief.

Arief yang pernah menjabat Plt. Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provsu ini mengatakan, dalam rangka menuju WTP 11 kali, langkah awal yang dilakukan adalah menyiapkan sumber daya manusia di lingkungan Pemprov.

Termasuk BKAD sebagai ‘leading sector’ pengelolaan keuangan daerah hingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus melakukan peningkatan pemahaman dan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

“Kami juga melakukan penguatan bagaimana menyusun laporan keuangan sejak dini atau semester pertama tahun anggaran berjalan dengan melakukan konsolidasi awal, baik itu saldo awal maupun yang berhubungan dengan pelaporan barang milik daerah (BMD) hingga aset tetap,” jelasnya.

Langkah ini, kata Arief diperlukan dalam rangka menyusun laporan keuangan yang akurat setiap tahunnya. “Kami akan memastikan seluruh dokumen-dokumen yang berhubungan dengan laporan keuangan didokumentasi dengan baik.



Serapan Anggaran Maksimal

SekdaprovSU Arief S Trinugroho juga mengingatkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat menggunakan anggarannya secara maksimal.

Berkaca tahun 2023 lalu, Arief meyakini banyak peningkatan yang sudah dilakukan Pemprov Sumut, terutama dalam hal pengelolaan hingga laporan keuangan. Namun menurutnya, tidak menjadikan OPD PemprovSU harus berpuas diri, sebab masih banyak target yang harus dicapai di masa mendatang.

Terkait kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Sumut, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara menempatkan PemprovSU pada level 3 sesuai karakteristik level maturitas (kualitas SPIP).

Adapun karakteristik maturitas dimaksud yakni level 1 disebut dengan 'Rintisan' yang menempatkan satu organisasi pada kluster dimana belum mampu mendefinisikan kinerja,



strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya. Sedangkan level 2 disebut 'Berkembang' karena dinilai sudah mampu mendefinisikan kinerja, strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya namun masih sebatas pemenuhan.

Sumatera Utara sendiri yang berada pada level 3 'Terdefinisi' dianggap telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, strategi pencapaian sudah relevan dan terintegrasi. Namun pengendalian masih perlu penyempurnaan dan peningkatan. "Targetnya kita bisa mencapai sampai level 5 (Optimum)," tegas Arief.

Level 5 atau 'Optimum' dimaknai dengan pendefinisian kinerja yang baik dari OPD, strategi

pencapaian relevan dan terintegrasi, pengendalian hingga adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. "Jika semua tertib, administrasi tertib, maka pemeriksaan nantinya lebih mudah dilakukan," katanya.

Sesuai arahan Pj.Gubsu agar dilakukan percepatan pembangunan dan realisasi serapan anggaran. "Banyak yang harus dicapai dengan percepatan realisasi ini, sesuai arahan Pak Gubernur," ungkap Arief.

Untuk menggenjot upaya percepatan realisasi pembangunan di Sumut, Arief menyebut PemprovSU kini sudah melakukan penganggaran dengan pola paralel dimana perencanaan maupun pelaksanaan hampir berjalan bersamaan. (*)



APBD Sumut 2025 Tetap Realistis

Pada kesempatan lain Pj Gubernur Sumatera Utara Dr. Agus Fatoni, MSi menekankan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut tahun 2025 tetap realistis.

Hal ini disampaikan saat memimpin Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2025 di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Sumatera Utara, 14 Juli 2024 lalu.

Fatoni mengatakan, APBD perlu disusun secara realistis sehingga kemampuan

keuangan daerah dapat terukur secara akurat. Hal ini diharapkan kebijakan, program, target dan belanja sesuai dengan APBD yang sudah ditetapkan.

"Harus realistis agar bisa direalisasikan sehingga program kita, target-target yang ingin dicapai, belanja semua sesuai, tepat dan akurat," kata Fatoni.

Fatoni juga mengajak para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut mengikuti rapat membahas KUA PPAS APBD 2025 secara cermat dan teliti. "Meskipun kita membahasnya

di hari libur, ini merupakan pedoman kita dalam menyusun APBD 2025," ucap Fatoni.

Menurutnya pembahasan KUA-PPAS APBD 2025 sangat penting sehingga penyusunan APBD dapat lebih berkualitas dalam menjawab dinamika pembangunan di Sumut.

"APBD kita perlu menjawab dinamika serta kebutuhan masyarakat. Karena itu perlu kita evaluasi sebaik mungkin agar masyarakat merasakan dampak dari program-program dan kebijakan yang dibuat pemerintah," sebut Fatoni. (*)

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsum), Sekretariat merupakan pendukung utama dalam memastikan kelancaran operasional serta pengelolaan administrasi secara umum yang bermuara pada penguatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprovsum.

Secara garis besar, sekretariat di bawah pimpinan Sekretaris BKAD Sumut, utamanya bertugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu.

Tugas lainnya adalah administrasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu. Dengan kata lain, Sekretaris berperan penting dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan lalu lalang administrasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu.



Dukungan Sekretariat Strategis dalam Mengkoordinasikan Kinerja BKAD Sumut

Sekretaris BKAD Sumut, Hendra Yudi mengatakan bahwa beberapa gambaran terkait fungsi sekretariat, diantaranya penyelenggaraan koordinasi dan persiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja bidang, yakni Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Perbendaharaan Daerah, Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota.

“Untuk semua bidang ini, kesekretariatan mendukung kerja-kerja mereka. Kita sebagai supporting system terutama dalam menyiapkan kelengkapan administrasi. Baik koordinasi antara bidang, koordinasi dengan Kepala Badan dan juga koordinasi antar seluruh OPD vertikal di lingkungan Pemprov Sumut,” ujar Hendra Yudi.

Mantan Kabid Bina Keuda Kab/Kota BKAD Provsu ini juga menerangkan pentingnya dukungan utama sekretariat menentukan tertib dan ketepatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di internal BKAD Sumut.

Hal ini agar penyelenggaraan pengelolaan dan pengendaliannya bisa berjalan baik dan sesuai aturan. Termasuk juga untuk penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan/ ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan.

“Untuk seluruh bidang yang ada, sekretariat juga terlibat dalam hal pembinaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja. Begitu juga soal tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris dan aset,” jelasnya.

Sementara terkait urusan lain, Hendra Yudi menyebutkan bahwa sekretariat BKAD Sumut

berfungsi menyelenggarakan sistem informasi publik, manajemen kegiatan pimpinan BKAD hingga tugas lainnya yang diberikan kepala badan. Dengan demikian, diperlukan upaya penguatan peran dan fungsi sekretaris guna mengakomodir dan mengkoordinasikan seluruh bidang.

“Prinsipnya sekretariat mengikuti apa yang menjadi kebutuhan seluruh bidang

di BKAD. Jadi kita selalu hadir dan ikut serta dalam urusan setiap bidang. Karena fungsinya yang cukup sentral, Sekretariat harus biasa memastikan seluruh proses administrasi berjalan, baik antar bidang maupun ke semua OPD lain,” sebutnya.

Untuk memastikan tugas dan fungsi kesekretariatan di BKAD Sumut berjalan baik, efektif dan tepat, Hendra Yudi menjelaskan upaya penguatan kapasitas kepada jajarannya.



“Untuk semua bidang ini, kesekretariatan itu mendukung kerja-kerja mereka. Kita sebagai supporting system, terutama menyiapkan kelengkapan administrasi. Baik koordinasi antara bidang, koordinasi dengan Kepala Badan, dan juga yang dari seluruh OPD Pemprov Sumut. “

Salah satunya dengan melakukan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada para staf di lingkungan sekretariat. Selain itu menyelenggarakan pengolahan dan penyajian bahan/data keterangan dalam penyelenggaraan kesekretariatan.

“Kami juga memberikan bimtek kepada para staf dalam peningkatan dan penguatan kapasitas mereka. Begitu juga untuk pegawai tidak tetap, tetap kita bekali untuk memotivasi dan menguatkan keterampilan mereka. Sehingga perannya sama

penting dengan pegawai ASN lain,” ucapnya.

Kata Hendra Yudi, sekretariat harus luwes dan bisa masuk ke semua lini dan bidang. Sebab pengendalian administrasi secara umum di lingkungan BKAD Provsu ada di sekretariat,” jelasnya.

Secara khusus, Hendra Yudi memaparkan uraian tugas bidang Sekretariat meliputi beberapa hal, seperti menyelenggarakan pengkajian dan analisa pengelolaan sekretariat, konsultasi dan asistensi sekretariat, inventarisasi dan identifikasi



sekretariat, pemantauan dan observasi penyelenggaraan sekretariat, pengembangan informasi dan komunikasi publik dalam penyelenggaraan urusan sekretariat sesuai peraturan perundang-undangan.

“Sekretariat juga menyelenggarakan bimbingan teknis sumber daya aparatur urusan keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal, penyusunan dan penyempurnaan telaah staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengembalian kebijakan sesuai bidang tugas dan fungsinya,” papar Hendra Yudi.

Sekretariat juga menasar pada urusan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tulisan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, backup kegiatan pimpinan serta penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk fungsi koordinasi dan penyelenggaraan administrasi secara umum, Hendra Yudi menyebutkan bahwa sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah/Sub Koordinator, serta Fungsional Analis Perencanaan.

Dari perangkat ini, sekretariat berperan aktif dalam hal penyusunan rencana kerja BKAD Sumut, seperti kesiapan dokumen Musrenbang, laporan keuangan Pemprov Sumut ke BPK-RI hingga lingkup yang lebih luas yaitu, rencana kerja APBD dan P-APBD Sumut.

“Untuk semua tugas dan fungsi di seluruh bidang BKAD Sumut, sekretariat harus memastikan agar seluruh proses administrasinya berjalan lancar dan terpenting memastikan semuanya tidak tumpang tindih. Dengan demikian, kita harus hadir untuk seluruh bidang serta mendistribusikan keperluan dari OPD lain ke BKAD Sumut,” pungkasnya. (*)



Konsistensi Akuntabilitas Laporan Keuangan, Kunci Menuju WTP Ke-11

Akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menjadi tolok ukur capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan bahkan hingga pengawasan.

Puncaknya adalah penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bisa kembali diraih untuk ke-11

kalinya di tahun 2025 setelah selama satu dekade berhasil diperoleh secara beruntun.

Untuk menuju capaian opini terbaik itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan penting dalam menyiapkan dan memastikan penyusunan pelaporan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah sebagai pertanggungjawaban akhir secara menyeluruh. Secara

khusus, peran itu diambil oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebagai motor akuntabilitas laporan keuangan tersebut.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, BKAD Sumut, Ratna Sari Pinem menyampaikan bahwa Pemprov Sumut terus berupaya menjaga konsistensi agar pengelolaan keuangan, khususnya dalam hal penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara menyeluruh dapat diterima dengan baik.



Tujuan bersama adalah mewujudkan good government dan clean governance. Termasuk mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk memiliki tata kelola keuangan yang mumpuni sebagaimana fungsi Gubernur selaku pembina.

Adapun pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara yang selama ini mendapat opini WTP dari BPK-RI tidak terlepas dari sajian laporan yang sesuai dengan aturan serta memenuhi kriteria.

Diantaranya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian efektivitas sistem pengendalian intern (SPI)

“Kita terus berupaya memberikan dan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Pemprov Sumut selama satu dekade mampu mempertahankan pencapaian opini WTP dari BPK-RI sejak 2014 hingga 2024. Secara prinsip bahwa

opini WTP yang diberikan merupakan pernyataan kewajaran atas penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP,” jelas Ratna.

Dari segi kualitas, kata Ratna, Pemprov Sumut terus melakukan perbaikan dalam penyajian laporan keuangan. Baik dari segi waktu, transparansi substansi, pengungkapan disertai bukti-bukti pendukung, termasuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK-RI tahun sebelumnya yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam tata kelola keuangan daerah.

“Opini WTP ini tidak hanya sebatas euforia dan kebanggaan semata. Tidak pula sebatas target pemerintah pusat dan daerah saja. Jauh lebih penting adalah bagaimana perencanaan dan penganggaran disusun berdasarkan nurani, etika yang tinggi, keberanian serta kejujuran dan keikhlasan sehingga tercipta program-program pembangunan bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Sehingga opini WTP selanjutnya menjadi satu budaya dalam laporan keuangan pemerintah daerah,” tegasnya.

Ratna menyebut dalam penatausahaan dan pelaporannya dilakukan secara akuntabel dan transparan serta diawasi secara ketat. Tugas-tugas dalam bidang akuntansi dan pelaporan yang dilakoninya, salah satunya adalah menyusun dan menyelenggarakan kebijakan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah serta menyusun laporan keuangan pemerintah.

Sejalan dengan fungsinya yakni penyelenggaraan koordinasi penyusunan rancangan peraturan



daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah serta penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan sumber daya aparatur dalam bidang akuntansi pemerintahan.

Dari uraian tersebut, Ratna mengatakan bahwa secara garis besar upaya Pemprov Sumut mendorong pencapaian Opini WTP setiap tahunnya direalisasikan dengan peneguhan komitmen pengelolaan keuangan daerah yang profesional dari seluruh OPD dengan menerapkan asas umum, diantaranya: peningkatan SPI oleh seluruh pegawai dan pejabat; pembinaan secara berkesinambungan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); pengembangan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah yang berkesinambungan melalui pendidikan dan pelatihan.

“Kita juga memperoleh dukungan audit internal dari Inspektorat Daerah yang profesional. Kemudian ada upaya peningkatan kajian aspek legalitas dalam seluruh proses pengelolaan keuangan daerah. Begitu juga meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan; melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek,” ucapnya.

Ratna juga menjelaskan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2024 nantinya tetap mempertimbangkan karakteristik kualitatif yang merupakan pra syarat



normatif penyusunan laporan keuangan yaitu relevan, andal dapat dibandingkan dan mudah dipahami, akuntabel, transparan serta taat peraturan perundang-undangan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah juga melakukan berbagai terobosan dan inovasi lewat pengembangan sistem aplikasi akuntansi dan pelaporan keuangan pada SIPD (Sistem

Informasi Pemerintah Daerah), rekonsiliasi data eksternal dan internal secara berkala, penyusunan laporan keuangan interim berkala dan mengidentifikasi permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Sebagai upaya paripurna sebut Ratna, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pembinaan secara berkesinambungan dan terus-menerus

kepada seluruh pengelola keuangan di semua level kepentingan perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Utara.

“Pembinaan ini meliputi pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah provinsi dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan serta memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah,” jelasnya (*)





Pengelolaan Aset Daerah, Fokus pada Penguatan Tertib Administrasi Hingga Aspek Histori

Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memajemen kepemilikan aset atau barang milik daerah (BMD) kini tak hanya mengarah pada penguatan tertib administrasi, namun juga aspek histori atau sejarah keberadaannya.

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Diah Ananda mengatakan bahwa saat ini pengelolaan BMD telah berlangsung berdasarkan peraturan berlaku, yakni Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara No.7/2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Pemerintah tentang hal yang serupa.

Secara garis besar, Diah Ananda menjelaskan bahwa pengelolaan BMD mencakup empat hal, yakni penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan. Hal ini bertujuan agar seluruh aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi tertib administrasi. “Dari pengelolaan BMD ini, setidaknya empat tugas utama yang bisa dijabarkan sesuai target capaian tahun 2024 ini” sebutnya.

Tertib administrasi dimaksud meliputi empat tugas penting dalam pengelolaan BMD yakni penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan. Keempat tugas ini diakui terus mengalami perubahan sejak 10 tahun terakhir, sesuai arahan pemerintah pusat.

Seperti penggunaan Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (Simbada) pada 2014 silam yang digunakan untuk mengelola dan memantau barang dan aset yang dimiliki. Kemudian pada 2022 lalu, PemprovSU lalu membangun sistem aplikasi yang disebut ‘Si Anak Dara Sumut’, yakni Sistem Informasi Pengamanan, Pemeliharaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Teranyar, dalam pengelolaan BMD, PemprovSU sudah menggunakan aplikasi berbasis web lainnya bernama e-BMD. Dimana seluruh aset daerah tidak hanya terdata, tetapi juga terdokumentasi dengan manajemen yang baik, jelas dan terukur.



“Penatausahaan BMD sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sebagaimana ketentuan berlaku,” sebutnya.

Secara teknis, Diah Ananda menjelaskan bahwa selain penatausahaan, Pemprovsum juga memperkuat tertib administrasi dari sisi pemanfaatan aset. Mengingat perlunya efektifitas penggunaan BMD agar tidak ada yang terabaikan termasuk dari sisi produktivitasnya.

Beberapa jenis pemanfaatan yang merupakan bagian dari upaya tertib administrasi yakni berupa sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah (BGS)/bangun serah guna (BSG) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI). Hal ini mengingatkan Pemprovsum memiliki BMD yang potensial untuk digunakan pihak lain atau bahkan sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Contoh kecil misalnya, kita memasukkan sewa kantin sekolah yang harus terdata jelas. Kemudian pemanfaatan kapal penyeberangan Danau Toba. Begitu juga pinjam pakai area Pekan Raya Sumatera Utara dan hibah tanah kepada instansi pemerintah lainnya. Sedangkan yang tidak atau belum dimanfaatkan akan kita laporkan kepada Pengelola BMD yakni Sekretaris Daerah Provinsi,” jelas Nanda.

Dari aspek pemeliharaan, kata Ananda, seluruh BMD yang berada di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkoordinasi langsung ke BKAD melalui laporan setiap bulan per semester hingga per tahun. Sehingga setiap pengadaan, perbaikan ataupun peningkatan (pembangunan) tercatat dan terdata lengkap.

Diah Ananda menyebut bidang pengelolaan BMD juga membantu meneliti dan menyiapkan bahan

pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan kepada pejabat penatausahaan barang atau Kepala OPD. Termasuk juga dalam hal pemeliharaan/ perawatan BMD, dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan hingga pemindahtanganan.

Sementara terkait pengamanan BMD, Ananda menjelaskan pentingnya sertifikat dan dokumen lengkap tentang kepemilikan atas nama Pemprov Sumut. Begitu juga peran serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam hal memastikan agar aset daerah benar-benar dikuasai pemerintah provinsi.

Hal ini merujuk pada program nasional seperti sertifikasi tanah. “BKAD Provsu melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM agar pemahaman tentang tertib administrasi bisa terus diperkuat,” tambahnya.

Dalam pengelolaan BMD, Diah Ananda menyebut pihaknya saat ini mempersiapkan laporan BMD dengan keterangan lengkap berdasarkan aspek historis atau sejarah keberadaan aset tersebut. Langkah ini untuk memudahkan penelusuran ketika terjadi kendala dalam hal legalitas atau adanya upaya okupasi (penguasaan pihak lain).



“Jadi yang kita laporkan bukan hanya BMD secara faktual tetapi juga keterangan historisnya. Maka semua aset yang kita miliki punya catatan dan sejarah lengkap. Bahkan kita juga memasukkan aspek historis ini sebagai laporan ke KPK untuk membantu asal-usul dan sejarah aset,” ungkapinya.

Dari seluruh upaya pengelolaan BMD ini, kata Diah Ananda, Pemprovsum melalui BKAD menargetkan penguatan tertib administrasi semakin terukur mengingat posisi aset sangat

mempengaruhi penilaian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI setiap tahunnya.

“Sistem pengelolaan BMD ini berlaku secara menyeluruh, tercatat dan terpusat di BKAD Provsu. Sehingga tidak ada aset baik non operasional (tidak bergerak) maupun operasional (bergerak) yang luput dari pendataan kita. Semuanya terdata dan dilaporkan dengan baik, jelas dan terukur,” tegas Ananda. (*)

BKAD Pastikan Pengelolaan BMD Terukur Keberadaan dan Penggunaannya

Bidang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprov Sumut sepanjang 2024 terus berkomitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan berlaku. Bidang yang dipimpin Dra. Diah Ananda ini selalu berpedoman agar seluruh aset dan Barang Milik Daerah (BMD) terukur keberadaan maupun penggunaannya.

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Pemprov Sumut, Diah Ananda mengakui semua capaian kinerja tersebut merupakan penjabaran atas arahan Kepala Badan H Rahmadani Lubis selaku pejabat penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai petunjuk Gubernur Sumatera Utara sebagai pemegang kekuasaan BMD dan Sekdaprovsumu selaku pengelola BMD.

“Beberapa capaian penting tersebut diantaranya, Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Standar Harga,

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan, Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pemusnahan serta Penghapusan Barang Milik Daerah.

Dia mengemukakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dirinya dibantu tiga sub bidang yakni Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan BMD, Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan BMD dan Pejabat Fungsional Penilai.

Diah Ananda merinci, penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) yang disusun dalam aplikasi berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Perpres 53 tahun 2023 dan Keputusan Mendagri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.



Apabila Perangkat Daerah mengusulkan SHS TA 2024 diluar Perpres 33 Tahun 2020 dan Pepres 53 Tahun 2022, maka kata Diah terhadap usulan barang baru itu Kepala OPD membuat surat pernyataan menerangkan kegiatan tersebut.

Usulan kebutuhan baru dimaksud seluruhnya dapat diterima untuk diupload ke aplikasi SIPD setelah ada rekomendasi dari masing masing tim teknis selaku kontributor konten.

“Untuk menghindari komponen yang sama diusulkan berkali-kali oleh OPD maka pengusulan

komponen harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan bidang perencana atau program agar tidak terdapat duplikasi pengusulan komponen dalam beberapa bidang pada satu OPD,” urainya.

Diah Ananda menjelaskan sesuai Permendagri No.19 tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) bahwa Standar Harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.

Dalam perencanaan kebutuhan katanya secara umum Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) sebelum ini masih ada yang belum mempedomani standar satuan harga dalam proses penyusunan anggarannya.

“Untuk indikator kinerja yang digunakan dalam dokumen pelaksanaan anggarannya juga sebelum ini masih ada yang belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik sehingga penggunaannya dalam penyusunan anggaran belum dapat mengaitkan pengeluaran yang dilakukan dengan kinerja yang dihasilkannya,” ujarnya.

Agar persyaratan mendasar dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja dapat terpenuhi

pada penyusunan APBD maka faktor-faktor yang menyebabkan belum berjalannya penganggaran berbasis kinerja seperti keterbatasan sumber daya manusia, kelemahan data kinerja dan keterbatasan dana harus diantisipasi.

Berdasarkan hal tersebut, Diah Ananda menjelaskan bahwa pelaksanaan penyusunan SHS untuk TA 2023 berpedoman pada Permendagri RI No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja daerah harus berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 20 Ayat (6) Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan BMD menyatakan bahwa standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota.



Standar Kebutuhan Barang Jadi Acuan

Diah Ananda menjelaskan tentang penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dimana Pemprovsu terus berkomitmen melakukan standarisasi barang milik daerah agar sesuai peraturan yang berlaku.

“Dokumen Standar barang milik daerah dan Standar Kebutuhan barang milik daerah harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang dan

Standar Kebutuhan Barang Milik Negara sehingga Organisasi Perangkat Daerah harus memiliki standar barang yang sesuai dengan hak dan jabatannya,” ucap Nanda.

Kajian penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang telah selesai selanjutnya akan disusun dalam satu Kebijakan Gubsu tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Provinsi Sumut.



Hingga saat ini standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada Masyarakat dimana standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan barang milik daerah sebagai dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi sarana dan prasarana kerja.

Oleh karena itu BMD harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud pengelolaan BMD yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai.

“Untuk menunjang tata kelola yang baik, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran barang milik daerah hingga penatausahaan barang milik daerah itu sendiri,” ujarnya.

Pengelolaan BMD Harus Taat Asas

“Disinggung soal pelaksanaan pengelolaan BMD pada SKPD Provsu, Diah Ananda menyebut penyelenggaraannya selain melibatkan pengguna barang sebagai pembuat kebijakan, pengelolaan BMD juga wajib melibatkan satuan kerja jajaran atau vertikal sesuai kewenangan yang telah didelegasikan Pengelola Barang.

“Tentang penyelenggaraan penatausahaan BMD sangat diperlukan dengan kematangan perencanaan penyelenggaraan pengelolaan BMD dan pemahaman yang memadai tentang semua ketentuan yang mengatur prosedur maupun mekanisme pengajuan Penetapan Status Penggunaan BMD sehingga diyakini bahwa seluruh BMD



keberadaannya valid dalam penyajian data dan akuntabel dalam laporan serta legal dari aspek hukum,” ujarnya.

Dasar atau asas pengelolaan BMD baik itu penggunaan dan pemanfaatan, kata Diah dengan memperhatikan asas fungsional yaitu pengambilan keputusan dan solusi masalah di bidang pengelolaan BMD yang dilaksanakan kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang serta kepala daerah sesuai fungsi, asas kepastian hukum yaitu pengelolaan BMD

dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Tak kalah pentingnya asas transparansi yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMD yang transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

“Selain itu tentu ada asas efisiensi yaitu pengelolaan BMD diarahkan agar BMD digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan. Pun begitu dengan asas akuntabilitas

dimana setiap kegiatan pengelolaan BMD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Terakhir adalah asas kepastian nilai dimana pengelolaan BMD wajib pula didukung adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD,” rincinya.

Dasar hukum penyusunan RKBMD atau Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai Permendagri No

19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pada pasal 23 ayat (3) dinyatakan bahwa Pengelola Barang melakukan penelaahan

atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan / atau Pengelola Barang, dan hasil verifikasi tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan akhirnya akan mempermudah menerapkan informasi manajemen barang daerah melalui sistem Aplikasi e-RKBMD.

“Dari semua ketentuan dan aturan ini setiap OPD di lingkungan Pemprov su khususnya bagi pengguna barang telah memahami dan sudah ditingkatkan keterampilan sebagai petugas penyusunan barang demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola kebutuhan barang dan dapat dipertanggung jawabkan,” tutupnya. (*)



Suwito SE, Kabid Bina Keuangan Daerah Kab/Kota BKAD Provsu

“Kemauan dan Komitmen jadi Kunci WTP, Kabupaten/Kota Didorong Agar Naik Kelas”

Meskipun tantangan semakin besar dengan pemeriksaan yang lebih mendetail dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), keyakinan ini tetap menguat, terutama dengan dukungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumut sebagai garda terdepan pencapaian prestasi tersebut.

Kepala Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota BKAD Provsu, Suwito SE menyatakan bahwa optimisme ini didasari oleh kemauan yang kuat dari seluruh pihak terkait. “Yang pertama adalah kemauan, baik dari pemangku kebijakan hingga setiap individu yang terlibat. Semakin besar keinginan untuk mempertahankan WTP, semakin besar pula dukungan dan komitmen yang harus dilakukan,” ujar Suwito.

Salah satu pilar utama dalam menjaga predikat WTP adalah penerapan tata kelola keuangan yang baik, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Suwito menekankan pentingnya kedisiplinan dalam penyusunan anggaran, yang harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

“Semakin baik perencanaan, semakin baik pula pelaksanaannya. Kami telah memperbaiki berbagai aspek tata kelola, termasuk penatausahaan yang semakin akuntabel,” jelasnya.

Tak hanya fokus pada tingkat provinsi, Pemprov Sumut juga berkomitmen untuk mendorong kabupaten/kota yang masih berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP) agar naik kelas menjadi WTP, serta membantu daerah yang sudah WTP untuk mempertahankan prestasinya. Sebagai pembina keuangan daerah, Pemprov Sumut melalui BKAD memberikan bimbingan, evaluasi, serta masukan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.

“Kami mendorong kabupaten/kota untuk lebih tertib dalam pengelolaan keuangan,

termasuk menerapkan transaksi non tunai. Namun, perbaikan itu harus dimulai dari kemauan mereka sendiri. Semakin tinggi komitmen, semakin besar peluang mereka untuk mencapai WTP,” ucap Suwito.

Komitmen yang sama juga menyasar fokus lain salah satunya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terus didorong untuk meningkatkan kualitas pelaporannya. “Keberhasilan ini tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dengan semakin kecilnya peluang penyalahgunaan anggaran. Dengan sistem transaksi non tunai yang sudah mencapai 100 persen, setiap rupiah tercatat dengan baik dan transparan,” tegas Suwito yang juga Plt. Perbendaharaan Daerah BKAD Provsu.



Kolaborasi dengan Pihak Eksternal

Suwito menjelaskan saat ini Pemprov Sumut juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melakukan supervisi serta pihak Kejaksaan (Adhiyaksa) yang bertindak sebagai pengacara negara dalam urusan aset daerah.

“Dengan supervisi dari KPK dan bantuan dari Kejaksaan, kami yakin pengelolaan keuangan maupun barang milik daerah dan aset semakin baik ke depannya sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tambahnya.

Inovasi Teknologi

Tahun 2024 membawa tantangan tersendiri bagi Pemprov Sumut, mengingat banyaknya event besar yang digelar salah satunya adalah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh – Sumut yang sukses dilewati Pemerintah Sumatera Utara. Selain itu di depan mata juga ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Namun, Suwito yakin bahwa dengan perbaikan terus-menerus, baik di tahun 2024 maupun 2025, Pemprov Sumut akan tetap mampu mengelola keuangan dengan mempertahankan WTP.



Tingginya optimis meraih predikat WTP ke-11 kali secara beruntun juga didukung kabupaten/kota yang menjadi bagian tanggungjawab provinsi sebagai pembina, agar seluruh daerah di Sumatera Utara ikut mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Selain fokus pada tata kelola internal, Pemprov Sumut juga terus mengembangkan inovasi berbasis teknologi guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan daerah.



Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memperluas penggunaan aplikasi keuangan yang terintegrasi, sehingga semua transaksi dan laporan keuangan dapat dipantau secara real-time oleh setiap OPD terkait. Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga meminimalisir kesalahan administrasi yang dapat mempengaruhi audit BPK.

Inovasi ini juga mencakup pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan. Suwito menekankan pentingnya peran SDM yang kompeten dalam mempertahankan tata kelola keuangan yang baik.

“Kami selalu mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi para pegawai di bidang keuangan, termasuk di tingkat kabupaten/

kota, agar mereka selalu update dengan regulasi terbaru serta mampu menjalankan sistem keuangan berbasis teknologi yang semakin kompleks,” ungkapnya.

Selain itu, Pemprov Sumut juga mengadopsi pendekatan kolaboratif dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya untuk memastikan bahwa sistem pengawasan internal terus diperkuat. “Kolaborasi dengan lembaga pengawas lainnya sangat penting, terutama dalam membantu memperbaiki sistem pengendalian internal di kabupaten/kota yang masih berada dalam status WDP,” tambah Suwito.

Langkah ini tidak hanya diproyeksikan untuk mempertahankan WTP tetapi juga untuk menciptakan lingkungan keuangan yang sehat dan berkelanjutan di seluruh Sumatera Utara. (*)

**Ahmad Syafei, SE, Kepala Bidang
Perencanaan Anggaran BKAD Provsu**

“Perencanaan dan Kebutuhan Anggaran Harus Selaras dengan Target Pembangunan”

Bidang Perencanaan Anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Bidang ini bertanggungjawab untuk merumuskan, menyusun, dan mengendalikan perencanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Ahmad Syafei, SE selaku kepala bidang perencanaan anggaran BKAD Provsu mengaku tugas yang diembannya tidak hanya sebatas pada penyusunan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses perencanaan anggaran selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan kebijakan yang ditetapkan kepala daerah maupun pemerintah pusat.



Syafei menyebut beberapa tugas dan fungsi utama bidang perencanaan anggaran meliputi penyusunan rencana anggaran daerah atau penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Dalam proses ini bidang perencanaan anggaran akan

mengumpulkan data dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menyelaraskan kebutuhan anggaran dengan target pembangunan yang ditetapkan,” jelas Syafei.

Setelah APBD disusun dan disahkan, Syafei menyebut bidang perencanaan anggaran juga bertugas mengendalikan dan memantau pelaksanaan anggaran tersebut. “Ini termasuk melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran di setiap OPD serta memastikan bahwa pengeluaran anggaran sesuai dengan perencanaan awal,” sebutnya.

Terkait analisis keuangan daerah dilakukan dengan melihat dan menganalisis kemampuan keuangan daerah dengan melihat potensi pendapatan daerah, baik dari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, maupun sumber lain. “Berdasarkan analisis ini, bidang perencanaan anggaran akan memberikan masukan terkait alokasi anggaran yang efektif dan efisien,” jelasnya.

Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



Begitu juga untuk perencanaan multiyears atau perencanaan anggaran jangka menengah (multiyears) yang diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Perencanaan ini penting untuk memastikan keberlanjutan program-program strategis yang memerlukan alokasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun,” kata Syafei.

Terakhir adalah menyusun laporan anggaran, baik laporan semester maupun tahunan, untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara. Laporan ini nantinya akan menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan APBD, serta bahan pertanggungjawaban kepala daerah terkait penggunaan anggaran.

“Secara keseluruhan, bidang perencanaan anggaran memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan perencanaan anggaran yang baik, diharapkan Pemprov Sumut dapat mewujudkan program-program pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi tersebut,” urainya. (*)



Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, Ahmad Syafei juga menyebut bidang perencanaan anggaran BKAD Provinsi Sumatera Utara harus pula senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Hal ini penting agar kebijakan fiskal daerah tetap sinkron dengan kebijakan fiskal nasional.

MEKANISME PENYUSUNAN APBD (UU NO. 17/2003)



— Kolase Foto



Kolase Foto —



Kepala BKAD Provsu H Rahmadani Lubis menghadiri rangkaian kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh – Sumut tahun 2024 yang digelar di berbagai tempat di Kota Medan dan kawasan Sport Center, Kab. Deli Serdang. Kegiatan ini merupakan bagian dari perjalanan PON XXI di Sumut.



— Kolase Foto



Ragam kegiatan Sekretaris BKAD Provsu Hendra Yudi bersama staf

Kolase Foto —



Kolase Foto



Ragam kegiatan
Plt.Kabid
Perbendaharaan dan
Kabid Bina Keuangan
Daerah Kab/Kota
Suwito bersama staf.

Kolase Foto



Ragam kegiatan Kabid
Pengelolaan Barang Milik
Daerah (BMD) Diah Ananda
Harahap bersama staf.



— Kolase Foto

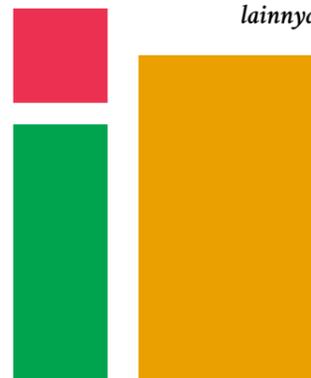
Kolase Foto —



Ragam kegiatan Kabid Akuntansi dan Pelaporan Ratna Sari Pinem bersama staf.



Ragam kegiatan Kepala BKAD, Sekretaris dan Kabid Perencanaan Anggaran Daerah Ahmad Syafei bersama staf lainnya.



PON XXI Sumut Sukses

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni sebagai Ketua PB PON XXI Wilayah Sumut menyampaikan, pihaknya yakin pelaksanaan PON XXI di Sumut tidak ada meninggalkan hutang. Bahkan PB PON Sumut telah menyurati BPKP agar segera melakukan review soal penggunaan anggaran PON.

“Sumut Insya Allah, tak ada hutang. Untuk Aceh, nanti saya sebagai Dirjen Keuangan akan melakukan pendampingan. Nanti kami akan carikan solusi. Solusinya bisa diambil dari belanja tidak terduga atau BTT, atau kalau kurang bisa diambil dari kas yang ada,” ucap Fatoni saat bersilaturahmi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, di Kantor Kemenpora, Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

“Kami juga sudah mengirim surat ke BPKP untuk review, kalau ada kelebihan bayar maka kita tuntaskan. Kalau ada kurang segera kita perbaiki,” sambungnya.

Dalam kesempatan ini, Fatoni melaporkan bahwa selama pelaksanaan PON di Sumut semua berjalan lancar. Hal ini ditandai dengan tidak adanya jadwal pertandingan yang tertunda dan sejumlah venue di Sumut juga bisa digunakan saat pelaksanaan pertandingan.

“Kalau venue voli indoor itu hanya akses jalan di belakang namun begitu, hari itu juga langsung diperbaiki. Namun yang diviralkan saat yang masih becek, yang sudah diperbaiki tidak diviralkan. Lalu yang diviralkan adalah Stadion Utama,” jelas Fatoni.



Sebagian masyarakat beranggapan kalau stadion itu untuk bertanding, sehingga yang diketahui belum siap. Padahal stadion utama hanya untuk acara closing ceremony PON XXI,” lanjutnya.

Kemudian terkait makanan atlet, Sumut telah menyiapkannya dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan mengikutsertakan ahli gizi, tim medis dan penyediaan ambulance di setiap hotel tempat atlet menginap.

“Untuk atlet ini makannya di hotel, ada ahli gizinya, tidak ada masalah,” ucap Fatoni.

Selanjutnya, Fatoni juga melaporkan terkait pelaksanaan closing ceremony PON XXI Aceh-Sumut yang diselenggarakan di Stadion Utama, Desa Sena, Kabupaten Deliserdang berlangsung meriah. Menurutnya, seluruh masyarakat sangat antusias melihat acara closing ceremony tersebut.

“Kemudian penutupan aman. Tandanya itu gampang, kalau penonton ngamuk-ngamuk, penonton cabut-cabut spanduk, dan menghancurkan yang di situ,

tandanya gak aman. Kemarin itu penonton bertahan lama di stadion, nikmati acara, berarti kan aman. Itu kalau tidak dimatikan lampunya tak akan keluar, bisa sampai pagi, dimatikan bertahap lampunya,” jelas Fatoni.

Fatoni menyampaikan pelaksanaan PON di Sumut berjalan aman. Dia juga berterima kasih kepada Kemenpora yang telah membimbing, mengarahkan dan melakukan pendampingan atas pelaksanaan PON.

Terkait isu dugaan korupsi yang dituduhkan, kata Fatoni, sebagai penyelenggara tidak ingin dan tidak punya

kesempatan untuk korupsi. Sebab semua ikut mengawasi, dari pusat ada Satgas, di daerah ada TNI dan POLRI, kejaksaan yang juga masuk dalam kepanitian.

“Dan kita juga bersyukur TNI, POLRI, Kejaksaan ikut terlibat dalam pelaksanaan PON. BPKP, inspektorat, BPK, yang juga melakukan pengawasan. Ada juga media dan masyarakat yang ikut mengawasi dan menyukseskan pelaksanaan PON,” katanya.

Diketahui PON XXI Aceh-Sumut dilaksanakan pada 8-20 September 2024. Pembukaan PON dilaksanakan di Provinsi Aceh pada 9 September 2024 sementara Penutupan dilaksanakan di Provinsi Sumut pada 20 September 2024. Untuk pertama kalinya penyelenggaraan PON dilaksanakan oleh dua provinsi yakni Aceh dan Sumut.

Turut hadir pada pertemuan itu, di antaranya Ketua Harian PB PON XXI Wilayah Sumut Baharuddin Siaggian, Sekretaris Umum Effendi Pohan, Kepala Bidang Humas, Publikasi dan IT Ilyas S Sitorus. Hadir juga jajaran PB PON XXI Wilayah Sumut dan juga jajaran Kemenpora RI. *



Evaluasi Kinerja Triwulan I, Ekonomi Sumut Tumbuh 4,95%

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni mengatakan telah terjadi penurunan drastis terkait penanganan inflasi di Provinsi Sumut. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Laporan Kinerja Triwulan I Periode 24 Juni sampai 24 September 2024 kepada Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Fatoni mengatakan bahwa saat dirinya pertama kali menjabat sebagai Kepala Daerah di Sumut pada bulan Juni 2024, angka stunting berada pada angka 3,35%. Kemudian terjadi penurunan pada bulan Juli 2024, yaitu menjadi 2,06%. Selanjutnya pada bulan Agustus 2024 berhasil turun mencapai angka 1,86% bahkan berada di bawah angka inflasi secara nasional.

“Awal menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara pada Juni kondisi inflasi 3,35%, di atas inflasi nasional. Pada Juli dan Agustus, tingkat inflasi di Sumut berhasil terkendali dan mengalami penurunan dua kali di bawah nasional,” ujarnya.

Tak hanya berhasil menangani stunting, dalam kesempatan ini Fatoni juga menyampaikan berbagai capaian pembangunan di Sumut. Di antaranya terkait pertumbuhan ekonomi, pembinaan dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan kualitas pelayanan publik, persoalan pengangguran, penanggulangan kemiskinan, pembangunan kesehatan, pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perizinan berusaha, serta kegiatan inovasi dan unggulan lainnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang senantiasa membina dan mengevaluasi kami, sehingga dalam tiga bulan ini kami bisa menjalankan roda pemerintahan, pembangunan di Sumut,” kata Fatoni.

Terkait pertumbuhan ekonomi, Provinsi Sumut pada triwulan ini berhasil tumbuh sebesar 4,95% atau sebesar 0,07% jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 4,88%.

Kemudian terkait penurunan angka stunting, berdasarkan hasil rilis survey Standar Gizi Indonesia Kemenkes RI tahun 2023, prevalensi stunting Sumut 18,9% berada dibawah angka nasional, yaitu sebesar 21,5%. Angka tersebut tentunya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan prevalensi stunting Provinsi Sumut pada tahun 2022, yaitu sebesar 21,1%.

Selanjutnya, terkait tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumut juga mengalami tren penurunan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, tercatat tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumut berjumlah 408 ribu jiwa atau 5,10% dari jumlah angkatan kerja.

“Terjadi penurunan pengangguran sebanyak 5.000 jiwa,” ucapnya.

Tak kalah penting terkait program penanggulangan kemiskinan, Fatoni mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sumut berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 8,15% pada tahun 2023 menjadi 7,99% pada tahun 2024. Hal ini berarti telah terjadi pengurangan jumlah masyarakat miskin sebesar 12.000 jiwa atau dari 1.240.000 jiwa menjadi 1.228.000 jiwa.

Fatoni mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah melakukan sejumlah upaya melalui berbagai kegiatan andalan, salah satunya adalah dengan melaksanakan Gerakan Serentak. Di antaranya, Gerakan Serentak Penanganan Stunting se-Sumut, Gerakan Serentak Pembangunan se-Sumut dan Gerakan Memberikan Tablet Tambah Darah Serentak se-Sumut.

Selanjutnya, Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumut, Gerakan Kesetiakawanan Sosial Serentak se-Sumut, Gerakan Serentak Lindungi Pekerja Rentan se-Sumut, Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumut, Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumut, Gerakan Berkoperasi Serentak

se-Sumut dan Gerakan Inovasi Serentak se-Sumut. Tak hanya itu, Pemprov Sumut juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Polda/Polres/Polsek se-Sumut, Bulog dan mengimplementasikan 4K.

“4K itu yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Begitupun dengan upaya-upaya lainnya dalam membangun Provinsi Sumut telah kami lakukan,” ucap Fatoni.

“Semoga informasi yang kami sampaikan ini dapat menjadi masukan dan kami laksanakan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ke depannya,” sambungnya.

Turut hadir dalam kesempatan ini, di antaranya Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo, Sekretaris Inspektorat Jenderal M Husin Tambunan, Plh Inspektur II Inspektorat Jenderal Ihsan Dirgahayu, PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Azwan, PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Bachtiar Sinaga, Plt Inspektur IV Muhammad Dimiyati, Plh Inspektur Khusus Kusna Herman serta jajaran pimpinan OPD Sumut. *



Pemprov dan DPRD Sumut Tanda Tangan KUA PPAS R-APBD 2025 dan P-APBD 2024

Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Sumatera Utara (Sumut) menandatangani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan APBD tahun 2025 dan Perubahan APBD tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Rapat Paripurna di Gedung Paripurna DPRD Sumut, Medan, Sumut, Jumat (23/8/2024).

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni dan Ketua DPRD Sumut Sutarto. Kegiatan ini disaksikan oleh Wakil DPRD Sumut Rahmsyah Sibarani, dan Misno Adisyah Putra, anggota Fraksi-fraksi DPRD Sumut, Forkopimda, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut.

Pemprov Sumut bersama DPRD Sumut sepakat KUA PPAS R-APBD 2025 diperuntukan pada prioritas belanja daerah dan juga rencana kegiatan daerah berdasarkan program pemerintah. Di antaranya pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN.

“Demikian susunan ini dibuat sebagai prioritas yang menjadi acuan Rancangan APBD 2025 berdasarkan kesepakatan bersama DPRD Sumut dan Pemprov Sumut,” ucap Sekretaris DPRD Zulkifli yang membacakan hasil rapat KUA PPAS tersebut di Ruang Paripurna DPRD Sumut.

Sementara P-APBD 2024 meliputi asumsi-asumsi dasar perubahan kebijakan pendapatan, perubahan biaya belanja daerah. Termasuk di dalamnya penyesuaian penambahan penghasilan pegawai ASN juga dapat dilakukan perubahan sesuai dinamika yang berlanjut (*)

Pemprov dan DPRD Sumut Setujui APBD Tahun 2025, Rp. 13 Triliun Lebih



Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar lebih dari Rp13 triliun untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kegiatan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Medan, Sumuta, Jumat (13/9/2024).

Persetujuan Ranperda tentang APBD Sumut Tahun Anggaran 2025 ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Pemprov Sumut yang ditandatangani langsung Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni dan Ketua DPRD Sumut Sutarto diikuti Wakil Ketua Harun Mustafa Nasution, Irham Buana Nasution, Rahmansyah Sibarani dan Misno Adisyah Putra.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni mengatakan dengan ditandatanganinya persetujuan bersama ini, maka penyusunan APBD tahun anggaran 2025 telah mendekati tahap penyelesaian. Untuk itu, Pemprov Sumut segera mempersiapkan dan menyampaikan dokumen yang diperlukan untuk proses evaluasi Ranperda APBD 2025.

“Kita akan siapkan termasuk Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Sumut tentang penjabaran APBD tahun 2025 untuk diteruskan ke Mendagri,” kata Fatoni.

Untuk itu, Fatoni berterima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2019-2024 atas dedikasi dan kontribusinya menyusun dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan di Sumut.

“Saya mewakili jajaran Pemprov Sumut mengucapkan terima kasih kepada ketua dan anggota dewan yang telah membahas dan menyetujui, serta memberikan saran serta masukan maupun rekomendasi yang dapat menjadi bahan masukan terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2025, dan permohonan maaf kepada dewan yang terhormat periode 2019-2024 yang akan mengakhiri

masa tugasnya dan berharap DPRD periode 2024-2029 akan meneruskan perjuangan dalam merencanakan, menganggarkan program pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumut,” ucap Fatoni.

Dalam kesempatan yang sama, menurut pandangan fraksi Yahdi Khoir Harahap menyampaikan Ranperda APBD 2025 memuat 4 isu strategis. Di antara, optimalisasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), optimalisasi pertumbuhan ekonomi inklusif, optimalisasi infrastruktur berkelanjutan dalam penguatan konektivitas dan daya saing daerah serta optimalisasi tata pemerintahan yang berkualitas dan inovatif.

Ranperda APBD tahun anggaran 2025 meliputi pendapatan daerah pada tahun 2025 sebesar Rp13.057.423.047.070, belanja daerah sebesar Rp13.107.423.047.070, sedangkan penerimaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp100 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp50 Miliar, serta pembiayaan netto Rp50 miliar.

Turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Sekda Sumut Arief S Trinugroho, Sekretaris DPRD Sumut Zulkifli, Forkopimda Sumut, para asisten dan kepala OPD Pemprov Sumut. (*)

Pj Gubsu Agus Fatoni Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2024 Bersama Mendagri di Jakarta

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi tahun 2024 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Pada kesempatan ini, Mendagri Tito Karnavian mengatakan inflasi year-on-year September 2024 tercatat pada 1,84% sementara untuk month-to-month September 2024 mengalami deflasi -0,12%. Inflasi kali ini dianggap sebagai inflasi terendah dan terbaik.

Menurut Mendagri, angka inflasi sebesar 1,84% adalah angka terendah dalam empat periode pemerintahan, bahkan kemungkinan sejak kemerdekaan Indonesia. Terdapat beberapa pendapat deflasi lima bulan berturut-turut yang dianggap pengamat sebagai rendahnya daya beli masyarakat.

“Inflasi ini ada dua, inflasi inti dan inflasi volatile. Kalau terjadi deflasi yang senang adalah masyarakat konsumen. Namun untuk produsen bisa rugi, kekurangan untuk memenuhi cost operasional. Penurunan harga jangan terlalu drastis, harus pelan-pelan,” katanya.

Melalui kesempatan ini, Mendagri juga berterima kasih kepada seluruh Kepala Daerah, Staf Kepresidenan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, BPS, Bapenas, Polri, TNI, Bulog, Kejaksaan dan stakeholder terkait yang telah menjaga inflasi. Pemerintah menargetkan inflasi dengan range 1,5% sampai 3,5%.

“Kepada 10 daerah yang masih tinggi nilai inflasinya, bisa melakukan evaluasi dan melakukan upaya segera, supaya pada rapat nanti tidak lagi masuk ke dalam catatan,” ujarnya.



Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi tahun 2024 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut mencatat Provinsi Sumut terus mengalami penurunan inflasi dalam empat bulan terakhir. Saat ini, angka inflasi Provinsi Sumut berada pada angka 1,40% year on year (y-o-y) sedangkan nasional berada pada angka 1,84%.

Berdasarkan Laporan BPS Sumut, pada Mei 2024 angka inflasi Sumut berada pada posisi 4,26% (y-o-y) dan menurun signifikan pada Juni 2024 sebesar 3,55%. Sementara itu, tercatat pada Juli 2024 angka inflasi Sumut kembali turun berada pada angka 2,06% (y-o-y) dan pada Agustus 2024 berada pada angka 1,86%.

“Penurunan inflasi diikuti juga dengan menurunnya harga-harga barang yang ada di pasaran. Kita perlu menjaga kestabilan inflasi kita agar harga barang dan daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga pertumbuhan ekonomi kita membaik,” kata Fatoni usai Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional di Jakarta.

Terdapat sejumlah komoditas penyumbang inflasi di Sumut, di antaranya beras, emas perhiasan, rokok kretek, gula pasir, dan minyak goreng. Sementara itu penyumbang deflasi, antara lain cabai merah, tomat, udang basah, daging ayam dan ikan tongkol.

“Beberapa komoditas pangan kita mengalami deflasi, tetapi masih terjaga dan Nilai Tukar Petani (NTP) masih cukup baik, menurut data BPS itu naik 1,40% dibanding NTP Agustus, kita harap NTP terus membaik agar petani kita semakin sejahtera,” ucap Fatoni.

Rakor yang ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Kemendagri juga diikuti seluruh Gubernur, Walikota/Bupati, Bulog, Kemendagri, Kementan, Kemendag, Satgas Pangan, Bapanas, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan seluruh pimpinan OPD. (*)



Presiden RI Joko Widodo Resmikan Stadion Utama Sumut “Pastikan Pengelolaan Berkelanjutan”

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Stadion Utama Sumatera Utara yang berlokasi di Desa Sena, Deliserdang, Sumatera Utara. Presiden berpesan agar stadion dan fasilitas yang ada diserahkan kepada pengelola, terutama setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI selesai.

“Sumatera Utara sekarang ini memiliki stadion yang sangat besar dan sangat mewah. Seperti yang kita lihat pada sore hari ini. Ini kemarin sudah dipakai penutupan PON Sumut dan Aceh. Karena stadionnya baru, kita lihat semuanya baru dan bagus,” kata Presiden di Stadion Utama Sumatera Utara, Desa Sena, Deliserdang, Sumut, Selasa (15/10/2024).

Sebagai informasi, stadion ini berkapasitas 25.000 penonton dan menghabiskan Rp587 miliar yang bersumber dari APBN selama proses pembangunan. Oleh karena itu, Presiden menitipkan stadion tersebut kepada pengelola agar dapat dikelola sebaik mungkin.

“Kalau stadion ini bisa diserahkan kepada klub-klub

sepak bola yang ada di Sumut, entah itu PSMS, PSDS atau yang lainnya agar terawat,” ucap Presiden.

Berdasarkan pengalamannya selama ini banyak fasilitas olahraga yang telah dibangun saat pengelenggaraan PON tidak terawat dengan baik. Oleh karena itu, dirinya mewanti-wanti agar Stadion Utama Sumut dan fasilitas olahraga lainnya dapat terus dirawat dan digunakan.

“Saya sudah lihat, satu, satu, satu, saya lihat semua. Karena tidak ada yang makai, tidak ada yang ngerawat. Jangan sampai kejadian itu terjadi di Sumut,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden juga menilai bahwa Stadion Utama Sumatera Utara memiliki bangunan yang megah dan mewah. Usai memberikan sambutan, Presiden langsung

meresmikan Stadion Utama Sumatera Utara yang ditandai dengan menekan tombol sirine serta penandatanganan prasasti.

Kemudian, Presiden juga meninjau sejumlah pemain sepak bola yang tergabung dalam sekolah sepak bola Dispora Sumut yang sedang latihan. Tak ketinggalan, Presiden juga membagikan baju kepada para atlet, anak sekolah dan masyarakat sekitar.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni mengatakan stadion yang megah dan mewah ini adalah salah satu hasil dari pelaksanaan PON di Sumut. Setelah PON usai, dirinya berkomitmen agar fasilitas olahraga tersebut nantinya akan dikelola sebaik mungkin.

Menurutnya, pengelolaan yang berkelanjutan, dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, Provinsi atau diserahkan kepada persatuan atau cabang olahraga (Cabor).

“Ini nanti akan dibicarakan. Tentunya kami juga harus menyiapkan bagaimana soal perawatan untuk fasilitas-fasilitas tersebut. Saya berharap setelah PON, seluruh fasilitas tetap terawat dan dipakai,” kata Fatoni.

Dalam kegiatan ini turut hadir sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni, Pj Bupati Deliserdang, para atlet, tokoh olahraga, dan sejumlah pimpinan OPD.*



BKAD Provsu Santuni Anak Yatim

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara kembali menunjukkan kepeduliannya lewat kegiatan bakti sosial dengan menyantuni sejumlah anak yatim (5/5/2024).

Kegiatan yang digelar di aula Dishub Pemprovsu ini dihadiri para pimpinan dan pegawai BKAD provsu serta puluhan anak-anak yatim dari berbagai panti asuhan di Kota Medan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral dan materiil kepada anak-anak yatim yang membutuhkan. Sebanyak 50 anak yatim menerima bantuan berupa paket sembako, perlengkapan sekolah serta uang tunai.



Kepala BKAD Provsu, Muhammad Rahmadani Lubis dalam sambutannya menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BKAD untuk memperkuat solidaritas sosial dan rasa kepedulian kepada anak-anak yang kurang beruntung.

“Kami berharap bantuan yang diberikan ini bisa meringankan beban dan memberikan kebahagiaan kepada adik-adik kita yang kurang beruntung.

Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata kepedulian kita bersama dalam membangun kebersamaan dan kebaikan antar sesama,” ujar Rahmadani.

Rani (12), seorang anak yang menerima bantuan mengungkapkan rasa syukurnya. “Saya sangat senang dan berterima kasih kepada BKAD karena bantuannya sangat berarti bagi saya dan teman-teman di panti asuhan,” ucap Rani. (*)



Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Mitra Kerja Pemprovsu

Dalam rangka percepatan penurunan stunting di Sumatera Utara, khususnya tindaklanjut paska intervensi serentak dan persiapan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, Pemprovsu bersama BKKBN menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Mitra Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang digelar di aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu (17/10/2024).

Acara ini dibuka Manna Wasalwa Lubis selaku staf ahli bidang ekonomi, keuangan, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini berlanjut dengan Penyampaian Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting sebagai tindaklanjut pelaksanaan Intervensi Serentak Juni 2024 lalu, yang disampaikan Kepala Bapelitbang Provsu Alfi Syahriza.

Kepala BAKD Provsu H Muhammad Rahmadani Lubis selaku salah satu narasumber pada kegiatan ini memaparkan pentingnya melakukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat penurunan angka stunting di Sumut yang saat ini masih menjadi salah satu tantangan besar di sektor kesehatan.

H. Rahmadani menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dan sinergi dengan mitra kerja termasuk organisasi non-pemerintah,

akademisi, dan sektor swasta. "Kita semua harus bersatu untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggungjawab bersama," ujarnya.

Salah satu program yang telah dan akan dilaksanakan Pemprovsu adalah intervensi gizi spesifik dan sensitif, termasuk pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil dan balita, serta kampanye edukasi bagi masyarakat.

Rapat ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting, di antaranya penguatan koordinasi di tingkat kabupaten/kota, peningkatan pemantauan dan evaluasi program, serta integrasi program percepatan penurunan stunting dengan program penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan rapat koordinasi ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus berjalan efektif dan efisien, demi menciptakan generasi Sumatera Utara yang sehat dan kuat, bebas dari stunting.

Hasil rekomendasi dari pelaksanaan Rakor TPPS diantaranya yaitu memaksimalkan intervensi spesifik yang langsung sasaran, percepatan realisasi BOK Dana Salur Puskesmas untuk PMT lokal, percepatan realisasi dana desa untuk percepatan penurunan stunting, kalibrasi ulang alat antropometri, pelatihan para kader Posyandu tentang tata cara pengukuran dan penimbangan dan mengoptimalkan peran CSR dalam percepatan penurunan stunting. (*)

Semangat Kebersamaan Warnai Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI



Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bersama Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara yang dipimpin Sekretaris BKAD Provsu, Hendra Yudi ini diikuti seluruh ASN dan Non-ASN di kedua instansi, Rabu (17/8/2024).

Dalam amanatnya, Hendra Yudi menekankan pentingnya peran setiap instansi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta memajukan pembangunan daerah.

“Kemerdekaan ini bukan hanya sekadar peringatan seremonial, tetapi juga sebagai momen refleksi bagi kita semua untuk bekerja lebih baik dalam mengelola keuangan daerah dan



memperbaiki layanan publik di bidang perhubungan,” ujar Hendra Yudi mewakili Kepala BKAD Sumut.

Yudi menambahkan bahwa semangat gotong royong yang ditunjukkan dalam perayaan ini harus terus menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.

Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI kali ini diharapkan mampu meningkatkan semangat kebersamaan dan kinerja seluruh aparatur negara di lingkungan BKAD dan Dinas Perhubungan Pemprovsum untuk terus memberikan yang terbaik bagi pembangunan dan kemajuan Sumatera Utara. (*)



Beragam Lomba Meriahkan Perayaan HUT ke-79 RI



Guna memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bersama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menggelar beragam lomba yang digelar tiga hari sejak 15-18 Agustus 2024 di lingkungan kantor kedua instansi tersebut.



Beragam perlombaan khas 17 Agustus ikut dipertandingkan seperti lomba karaoke, balap trenggiling, ambil koin dalam tepung, makan kerupuk tali, lomba masak, berebut kursi hingga lomba menangis dan merias pasangan turut menjadi bagian dari perayaan. Puncaknya para peserta lomba akan dan pegawai kedua instansi juga mengenakan drescode merah putih dan pakaian adat khas nusantara.

Kepala BKAD Provsu, Muhammad Rahmadani Lubis dalam sambutannya menyebut kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga untuk mempererat rasa persatuan dan kebersamaan di lingkungan kerja BKAD dan Dinas Perhubungan Provsu.



“Semangat kemerdekaan yang kita rayakan hari ini harus menjadi momentum untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” kata Rahmadani Lubis.

Perlombaan yang digelar juga diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja dan rasa kebersamaan antarpegawai, sehingga tercipta lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif.

Selain perlombaan, acara ini juga dimeriahkan dengan pembagian doorprize dan hadiah bagi para pemenang, yang menambah kemeriahan suasana.

Dengan digelarnya berbagai kegiatan tersebut, Rahmadani Lubis berharap semangat kemerdekaan terus terjaga dan menjadi motivasi bagi pegawai baik BKAD maupun Dishub untuk terus berkontribusi bagi kemajuan daerah dan negara. (*)



Lewat Pengajian dan Silaturahmi, BKAD Provsu Tingkatkan Nilai Spiritual

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) kembali menggelar kegiatan pengajian dan silaturahmi (27/7/2024) di aula Dishub Pemprovsu.



Dalam sambutannya Kepala BKAD Provsu Muhammad Rahmadani Lubis menyampaikan pentingnya menjaga kebersamaan dan meningkatkan kinerja melalui pendekatan spiritual. Ia mengingatkan agar setiap individu dalam organisasi senantiasa menjaga hubungan baik antar sesama, serta memperkuat nilai-nilai religius dalam bekerja.

“Pengajian dan silaturahmi ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas spiritual para pegawai di lingkungan BKAD Provsu. Kegiatan seperti ini tidak hanya memberikan ketenangan batin, tetapi juga memupuk kebersamaan di antara kita, sehingga kita dapat bekerja dengan lebih harmonis dan produktif,” ujar Rahmadani.

Acara yang berlangsung penuh khidmat dan kekeluargaan ini juga diisi ceramah agama dan doa bersama untuk keberkahan dan kesuksesan BKAD dalam menjalankan tugas-tugasnya, terutama dalam mengelola keuangan dan aset daerah dengan amanah.

Selain itu, silaturahmi antar pegawai BKAD diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi.*

Musrenbang RPJPD 2025-2045 Menuju Indonesia Emas



Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) jangka panjang 2025-2045 digelar Bappelitbang Provsu dengan sejumlah visi-misinya. Visi ini akan menjadi landasan strategis selama 20 tahun ke depan menuju Indonesia Emas.

“Implementasi visi-misi ini selaras dengan merealisasikan visi besar kita yaitu, keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Ini yang ingin kita capai terus menerus tanpa ada endingnya,” kata Kepala Bappelitbang Provsu Alfi

Syahriza pada pembukaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provsu tahun 2025-2045, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan, (29/4/2024).

Pada Musrenbang tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mengusung tema ‘Sumatera Utara Unggul Maju dan Berkelanjutan’ sebagai visi RPJPD Sumut tahun 2025-2045. Ada delapan sasaran utama visi yang ditargetkan, di antaranya meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk,

pengurangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan peran dan posisi di tingkat nasional dan global, peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca.

Alfi juga membeberkan delapan misi RPJPD meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, mewujudkan masyarakat demokratis dengan penciptaan lingkungan aman dan stabilitas ekonomi makro, mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi,



mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil, mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provsu Muhammad Ramadani mengatakan, keberhasilan visi-misi tersebut bergantung pada pengembangan wilayah yang berbasis zona di Sumut. Seperti diketahui, Sumut saat

ini memiliki empat zona yaitu zona Pantai Timur, Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Kepulauan Nias. “Zona-zona di Sumut ini adalah kunci pengembangan wilayah di Sumut, kita clusterkan itu, untuk menjadikan kolaborasi yang bagus,” kata Rahmadani.

Disebutkan, ada empat tahap arah kebijakan pembangunan RPJPD Sumut. Tahap pertama 2025-2029 merupakan tahap penguatan pondasi transformasi. Pada tahap kedua 2030-2034 merupakan tahap

percepatan transformasi. Di tahap ketiga 2035-2039 merupakan tahap ekspansi global. Di tahap terakhir 2040-2045 merupakan tahap perwujudan Sumut Unggul Maju dan Berkelanjutan.

“Mari kita manfaatkan momentum menyelesaikan perencanaan pembangunan yang komprehensif inklusif dan berkelanjutan, kita memiliki kesempatan mengoptimalkan potensi daerah,” ujar Rahmadani

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam sambutannya yang dibacakan oleh Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan mengatakan, pemerintah daerah perlu segera menetapkan RPJPD 2025 2045. Hal tersebut akan menjadi dasar bagi para calon kepala daerah dalam penyusunan visi misi nantinya.

Selain itu, Mendagri juga mengapresiasi beberapa capaian Pemprov Sumut. Diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut merupakan tertinggi ketiga di wilayah Sumatera yakni 75,13. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 mencapai 5,01%, dan tingkat kemiskinan berada pada angka 8,15%.*

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H

“Menteladani Akhlak Nabi dalam Menjalankan Tugas sebagai Abdi Negara”

Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H tahun 2024, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provsu bersama Dinas Perhubungan Provsu menggelar kegiatan maulid nabi di aula kantor Dishub Provsu, Kamis (10/10/2024).

Dengan tema “Merajut ukhuwah sekaligus peningkatan bina mental ASN dan non ASN di lingkungan BKAD Provsu dan Dishub Provsu yang mantap dan harmoni”, kegiatan ini diawali pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Muhammad Daud Sitorus.

Dalam laporannya, Ketua Panitia Taufik Azhar menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk komitmen terhadap syiar agama di lingkungan pemerintah.

“Alhamdulillah, peringatan Maulid Nabi tahun ini dapat terselenggarakan atas arahan dan bimbingan Kepala BKAD Provinsi Sumatera Utara sebagai rasa terima kasih kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW,” ujarnya.

Taufik berharap acara Maulid Nabi SAW ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk berkumpul bersama, bertatap muka bersama, dengan bekal ilmu, ketakwaan serta keimanan kepada Allah SWT.

Sementara itu Kepala BKAD Provsu, H Muhammad Rahmadani Lubis dalam sambutannya mengajak para ASN dan non ASN di lingkungan BKAD maupun Dishub Sumut untuk mengamalkan dan meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

“Nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kerja keras yang diteladankan oleh Nabi Muhammad diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Mari sama-sama kita syiarkan keteladanan dan kehidupan nabi di tempat kita berkerja,” ucap H.Rahmadani.

Menurutnya acara ini diselenggarakan sebagai wujud rasa syukur dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW serta menjadi momen untuk mengingat kembali ajaran-ajaran beliau yang sarat akan pesan perdamaian, cinta kasih, dan kehidupan yang penuh makna.

Peringatan Maulid Nabi SAW ini juga diisi dengan tausiyah yang disampaikan oleh seorang Ustadz Abdil Muhadir Ritonga yang membahas kisah-kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW.



Dalam ceramahnya, ustadz Muhadir mengajak seluruh hadirin untuk selalu mengingat Allah SWT dan mencontoh Rasulullah dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bekerja dengan penuh dedikasi dan keikhlasan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama.

“Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga

menjadi momentum yang baik untuk merefleksikan diri dan memperkuat tali silaturahmi antar sesama pegawai. Diharapkan melalui peringatan ini, semangat kerja yang didasari nilai-nilai Islami dapat semakin ditingkatkan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucap ustadz Mahadir.

Acara ini juga diiringi dengan penayangan film pendek kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang

semakin menambah suasana semakin religius, khidmat dan penuh semangat keagamaan.

Acara yang diadakan di lingkungan kantor pemerintah ini dihadiri oleh para pegawai BKAD Provsu, Dinas Perhubungan Sumut, serta sejumlah tokoh agama dan masyarakat. Kegiatan ini ditutup dengan hiburan musik religi dari para ASN dan Non ASN BKAD Provsu dan Dishub Provsu. (*)

Sumut Terima Aset BMN Senilai Rp. 578 Miliar

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menandatangani berita acara serah terima hibah Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp578.421.090 dari Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Acara tersebut berlangsung di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Adapun hibah BMN yang diterima oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, antara lain Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP). Fatoni berharap adanya hibah BMN tersebut dapat bermanfaat bagi rakyat Sumut.



“BMN ini pada prinsipnya adalah untuk rakyat, karena dibangun dengan uang rakyat, kita terima kasih telah dipercayakan menerima BMN ini, kita akan jaga asset-aset yang diserahkan ini,” kata Fatoni.

Fatoni menegaskan Pemprov Sumut siap memanfaatkan serta memelihara aset yang telah diterima. Sehingga aset tersebut dapat terus digunakan hingga kapan pun.

“Kita bersyukur telah diserahkan aset pada kita, sekarang tugas kita memeliharanya, aset ini harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga bisa bertahan lama,” ucap Fatoni.

Aset senilai Rp578 miliar yang diterima Pemprov Sumut merupakan bagian dari total aset senilai Rp19,16 triliun, yang diserahkan kepada kementerian lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, pemerintah desa, yayasan hingga perguruan tinggi.

Aset yang diserahkan pada kesempatan tersebut antara lain bangunan radar cuaca dan sistem perangkatnya, dan bangunan gedung kantor senilai Rp113,99 miliar. Downgrade jalan nasional kolektor, arteri, hasil pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah (IJD) dan jembatan gantung senilai Rp2,79 triliun.

Selanjutnya, jaringan air minum, pembangunan TPA, Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Pasar, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan peningkatan kualitas permukiman kumuh senilai Rp 9,53 triliun. Serta rumah susun, rumah khusus, PSU Jalan, dan meubelair senilai Rp6,82 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, serah terima tersebut merupakan bentuk atau cara penjelasan kepada publik bagaimana keuangan negara dikelola. Menurutnya, uang rakyat harus dikelola dengan transparan dan akuntabel seperti itu.



“Kiita bersyukur telah diserahkan aset pada kita, sekarang tugas kita memeliharanya, aset ini harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga bisa bertahan lama.”

“Jadi ini adalah memang cara kita untuk menjelaskan ke publik, bahwa uang yang kita kumpulkan di dalam APBN melalui pajak, bea cukai, maupun PNBPN itu digunakan dan dimanfaatkan disampaikan kepada masyarakat,” kata Menkeu.

Menkeu meminta kepada para penerima hibah BMN agar dapat memanfaatkan aset yang telah diterima sebaik-baiknya. Khususnya dengan melakukan pemeliharaan atau perawatan yang baik.

“Saya mohon titip, itu dibangun dengan uang rakyat, tolong dipelihara dan dimanfaatkan. Saya selalu berpesan barang-barang milik negara atau aset negara itu adalah sebuah aset yang harus dimanfaatkan, harus bekerja keras untuk memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial, manfaat lingkungan, bahkan manfaat kultural selain manfaat dari sisi finansial,” ucapnya.**



Jangan Hilang Kedua Karena Beda Pilihan

Jaga Pemilu Damai 2024





BKAD

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA